



# Bab 9

## Indikator Kinerja Daerah

Ukuran hasil kinerja atau keberhasilan suatu organisasi pemerintahan sesungguhnya tidak mudah diukur karena organisasi pemerintahan sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, pengukuran kinerja akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan visi dan misi kepala daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran organisasi di masa kini maupun yang akan datang. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan.

Asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

## RENCANA PEMABNGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan berdasarkan RPJMN 2014-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2011 s.d. 2016, untuk proyeksi 2016-2021.

### **Perkembangan IPM Tahun 2011-2014 Pada Periode RPJMD 2011-2016**

| No | Tahun | IPM   |
|----|-------|-------|
| 1  | 2011  | 76,99 |
| 2  | 2012  | 77,68 |
| 3  | 2013  | 78,65 |
| 4  | 2014  | 79,17 |

Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan otonomi daerah layak dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum IPM. Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM sangat dipengaruhi kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan yang berorientasi IPM, serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian indikator turunan IPM ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (*role position*) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi Daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (Kabupaten/Kota) untuk mengenali, menggali dan memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu-isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah. Isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu-isu lokal.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Tangerang Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Tangerang Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Jenis indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Jenis Indikator Makro Pembangunan**

| NO | JENIS INDIKATOR                     |
|----|-------------------------------------|
| 1  | Jumlah penduduk                     |
| 2  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)      |
| 3  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    |
| 4  | Angka Harapan Hidup (AHH)           |
| 5  | Angka rata-rata lama sekolah (RLS); |
| 6  | Angka harapan lama sekolah (AHS);   |
| 7  | Angka melek huruf;                  |
| 8  | Laju Perumbuhan Ekonomi;            |
| 9  | PDRB atas dasar harga belaku (ADH); |

**RENCANA PEMABNGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 10 | PDRB Perkapita ADH;   |
| 11 | Tingkat Inflasi;      |
| 12 | Tingkat kemiskinan;   |
| 13 | Tingkat pengangguran. |
|    |                       |

Dengan melihat arti penting pengukuran kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dan indikator kinerja program pembangunan. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dan indikator kinerja program pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut

**Tabel 9.1**  
**Sasaran,dan Indikator Kinerja Pembangunan**

| No  | Sasaran  | Indikator Sasaran   |
|-----|--|---|
| 1.1 | Pengelolaan keuangan daerah meningkat  | Opini BPK   |
|     |  | Persentase kenaikan PAD                                       |
| 1.2 | Pengelolaan kinerja pembangunan daerah meningkat   | Persentase Gap pencapaian sasaran                             |
|     |  | Predikat Akuntabilitas Kinerja                                |
| 2.1 | Meningkatnya nilai investasi   | Peningkatan Jumlah Investasi PMA dan PMDN                     |
| 2.2 | Meningkatnya pendapatan masyarakat   | Pendapatan per kapita (juta rupiah)                           |
| 3.1 | Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi dan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai | Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar                   |
|     |  | <i>Load factor</i> angkutan perkotaan                         |
| 3.2 | Meningkatnya pengelolaan sampah  | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk      |
| 3.3 | Meningkatnya RTH   | Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB |
| 3.4 | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup  | Indeks Kualitas Lingkungan                                    |
| 4.1 | Meningkat dan mantapnya derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat                                | Angka Kematian Bayi (AKB)                                     |

**RENCANA PEMABNGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

| No  | Sasaran   | Indikator Sasaran                         |
|-----|---|---|
|     |   | Angka Kematian Ibu (AKI)                  |
| 4.2 | Meningkatnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja                            | Rasio penyerapan tenaga kerja             |
| 4.3 | Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk dan pemberdayaan masyarakat & perempuan | Laju Pertumbuhan Penduduk                 |
| 4.4 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota   | Angka Kriminalitas                        |
| 5.1 | Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah                      | APK (Angka Partisipasi Kasar)             |
|     |   | APM (Angka Partisipasi Murni)             |
|     |   | Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama Sekolah) |
| 5.2 | Meningkatnya Kecukupan Tenaga Pendidik dan Kependidikan                           | Rasio murid terhadap guru                 |
| 5.3 | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat  | Jumlah kunjungan perpustakaan             |